

**INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN MOYO HILIR TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
KANTOR CAMAT MOYO HILIR  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat-Nya maka “Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dapat diselesaikan, yang merupakan gambaran untuk kegiatan dalam lima tahun kedepan.

Indikator Kinerja Utama merupakan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Moyo Hilir yang dibuat selama 5 tahun kedepan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa.

Penyusun menyadari bahwa Indikator Kinerja Utama ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu sumbang saran dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan.

Kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan terima kasih.

CAMAT MOYO HILIR,



**ULUMUDDIN. SE**

NIP. 19720629 199703 1 005  
Pembina Tk. I (IV/b)

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I   Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II   Penetapan Indikator Kinerja Utama.....	3
BAB III  Penutup .....	4

Lampiran – Lampiran :

Lampiran Dokumen Indikator Kinerja Utama tahun 2023.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia, penerapan Indikator Kinerja Utama ini akan sangat mewarnai berbagai kebijakan yang akan diterapkan. Saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan pemanfaatan Indikator Kinerja Utama ini. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun bersama oleh Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa azasazas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal, tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan demikian Pemerintah Kecamatan Moyo Hilir menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

## 1.2. Maksud dan Tujuan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah Kabupaten Sumbawa khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **BAB II**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Maka berdasarkan sasaran strategis dari instansi Pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Moyo Hilir dapat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran :

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kabupaten Sumbawa sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Moyo Hilir, Januari 2024

CAMAT MOYO HILIR,



**ULUMUDDIN. SE**

NIP. 19720629 199703 1 005  
Pembina Tk. I (IV/b)





## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MOYO HILIR

**UNIT ORGANISASI OPD : KECAMATAN MOYO HILIR**

**TUGAS :** Melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

**FUNGSI :**

- a. Penyusunan Visi dan Misi Kecamatan yang sesuai dengan Visi dan Misi Daerah
- b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- c. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat
- e. Penyelenggaraan kegiatan pendataan, pendaftaran, penagihan dan penyetoran pajak dan retribusi tertentu yang dilimpahkan Bupati
- f. Penyelenggaraan perizinan tertentu yang dilimpahkan oleh Bupati
- g. Pembinaan tata laksana pemerintahan Kecamatan
- h. Pengkoordinasian tugas yang dilaksanakan Kepala Desa
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Kecamatan
- j. Pemberian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Bappeda, termasuk LAKIP

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	FORMULA INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA INDIKATOR SASARAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Birokrasi yang bersih dan melayani publik	Peningkatan Katagori nilai Meningkatkan Nilai Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan Kualitas koordinasi penyelenggara	B	Persentase Peningkatan Nilai RB	Meningkatnya kinerja Kecamatan Moyo Hilir	Peningkatan Katagori nilai SAKIP Kecamatan Moyo Hilir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</li> <li>• Jumlah</li> </ul>	Kecamatan Moyo Hilir

		an pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan					<p>Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun</li> <li>• Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun</li> <li>• Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</li> <li>• Jumlah keluaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan</li> <li>• Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							Urusan Pemerintahan Daerah	
2.			100%	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase capaian Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</li> <li>• Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di kecamatan</li> <li>• Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</li> <li>• Jumlah Dokumen Pelaksanaan</li> </ul>	Kecamatan Moyo Hilir

							<p>Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</li></ul>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--